

PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI DAN KONSUMSI SUSU SEGAR



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI DAN KONSUMSI SUSU SEGAR

Penyusun:

Sjamsul Bahri
Ismeth Inounu
Tjeppy D. Soedjana
Atien Priyanti
Mohammad Ikhsan Shiddieqy
Bess Tiesnamurti



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

Hak Cipta @ 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Sapi Perah di Luar Jawa Mendukung Peningkatan Produksi dan Konsumsi Susu Segar/ Sjamsul Bahri, Ismeth Inounu, T.D. Soedjana, Atien Priyanti, Mohammad Ikhsan Shiddieqy dan Bess Tiesnamurti. – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2015: vi + 48 hlm; ilus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN : 978-602-8475-92-1

1. Sapi Perah 2. Produksi dan Konsumsi 3. Susu
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
III. Bahri, Sjamsul.

636.2.034:637.1

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Tata letak dan rancangan sampul: Asep M.

KATA PENGANTAR

Pulau Jawa dipandang sudah jenuh dalam upaya pengembangan sapi perah nasional, karena keterbatasan lahan dan sumber pakan yang ada. Wilayah di luar Pulau Jawa memiliki lahan yang masih terbuka luas, dan memiliki potensi sumber pakan yang sangat besar. Hal ini seiring dengan program nasional, dimana pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa perlu dikembangkan sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga berlaku untuk pengembangan sapi perah nasional, karena potensinya yang sangat besar dengan daya dukung ketersediaan hijauan pakan ternak dan biomassa dari limbah pertanian maupun perkebunan. Dalam jangka panjang, ketersediaan hijauan dan biomassa ini mampu mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak perah, selain dapat meningkatkan permintaan susu di luar Pulau Jawa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) telah mengadakan *workshop* bertemakan "Peningkatan Produktivitas Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Konsumsi Susu Segar". *Workshop* ini dilaksanakan seiring dengan peringatan Hari Susu Nusantara di Palembang, 1 Juni 2015 dengan menghadirkan beberapa nara sumber terkait dan didokumentasikan dalam buku ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga berbagai informasi yang dimuat dapat memberikan inspirasi bagi

kita semua untuk peningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi perah, khususnya di luar Pulau Jawa.

Bogor, Juli 2015

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan


Dr. Ir. Bess Tiesnamurti, MSc.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Tahapan Kegiatan.....	3
Sasaran dan Tujuan	6
Sasaran	6
Tujuan	6
Implementasi Cetak Biru Persusuan	
Indonesia 2013-2025	7
Kebijakan dan Program Pengembangan Sapi Perah	
di Luar Pulau Jawa	13
Program dan Strategi Kebijakan Hilirisasi	
Industri Susu	16
Dukungan Kebijakan Lintas Kementerian Untuk	
Meningkatkan Konsumsi Susu Segar.....	19
Jejaring Pengembangan Sapi Perah di Asia.....	22
Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan...	25
Matriks Rencana Tindak Strategi dan Kebijakan	
Pengembangan Sapi Perah di Luar Jawa	30
Daftar Bacaan	32
Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan	
Strategis Peternakan dan Veteriner	34
Tim Perumus	35

Lampiran	37
Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025	39
Kebijakan dan Program Pengembangan Ternak	
Perah di Luar Pulau Jawa	41
Kebijakan Hilirisasi Industri Persusuan Nasional	43
Kebijakan Pengembangan Sapi	45
Jejaring Pengembangan Sapi Perah di Asia	47

PENDAHULUAN

Lebih dari 90% populasi ternak perah terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan produksi susu segar mencapai 981,6 ribu ton (Ditjen PKH, 2013), sedangkan dalam Blue Print Persusuan Nasional (2013) dilaporkan bahwa pada tahun 2010, Industri Pengolah Susu (IPS) telah menerima susu segar sejumlah 1.480 ton/hari. Pada tahun 2015 diperkirakan konsumsi susu masyarakat Indonesia mencapai 11,64 liter/kap/tahun dengan kebutuhan mencapai 2,93 juta liter. Konsumsi susu ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang telah mencapai 20 liter/kap/tahun. Sementara itu produksi susu dari dalam negeri baru sebesar 21% sedangkan selebihnya dipenuhi dari impor.

Blue Print Persusuan (2013) telah merancang rencana aksi pengembangan persusuan 2013-2025 dengan *stakeholders* terkait. Salah satunya adalah peningkatan populasi dan produktivitas ternak perah mencapai 1,5 juta ekor pada tahun 2020. Ditargetkan produksi susu segar dapat mencapai 2,75 juta ton dengan konsumsi mencapai 20 l/kap/tahun. Saat ini, konsumsi susu nasional mencapai 11,7 l/kap/tahun, di mana konsumsi terbesar merupakan susu bubuk dan susu kental manis.

Pulau Jawa dengan keterbatasan sumber pakan sebagai syarat utama usaha peternakan sapi perah, dipandang sudah cukup jenuh untuk pengembangan

sapi perah ke depan. Keterbatasan lahan sebagai sumber pakan hijauan merupakan kendala utama untuk meningkatkan populasi sapi perah di Jawa. Lahan yang masih terbuka luas berada di luar Pulau Jawa, dan seharusnya sudah mulai dibangun untuk mengembangkan ternak perah. Hal ini juga selaras dengan program dan agenda pemerintahan dalam RPJMN 2015-2019, dimana pembangunan mulai didorong untuk dilakukan di luar Pulau Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata.

Pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah keberadaan pabrik pengolahan susu mungkin menjadi kendala utama dalam pengembangan ternak perah di luar Jawa. Hal ini juga tertuang dalam program aksi Blue Print Persusuan Nasional melalui peningkatan industri pengolahan susu. Peluang dan kendala untuk pembangunan sapi perah di luar Pulau Jawa perlu dipelajari secara mendalam.

TAHAPAN KEGIATAN

Melalui Workshop Persusuan Nasional yang bertemakan "Kebijakan Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Konsumsi Susu Segar" ini diharapkan dapat memacu percepatan pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa. Workshop ini dilaksanakan seiring dengan peringatan Hari Susu Nusantara di Palembang, 1 Juni 2015. Kegiatan ini merupakan kerjasama yang sangat baik antara Deputian Pangan dan Sumberdaya Hayati Kemenko Perekonomian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Litbang Pertanian (cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan).

Pengembangan sapi perah merupakan salah satu program nasional yang terdapat pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dan juga tertuang dalam *Blue Print* Persusuan Nasional tahun 2014-2025 (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2014).

Workshop dilaksanakan melalui koordinasi awal antara Tim dari Puslitbang Peternakan dengan Tim dari Kedeputian Pangan dan Sumberdaya Hayati Kemenko Perekonomian pada awal bulan Mei, antara lain membahas para narasumber yang akan diundang dalam workshop tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka nara sumber dari kegiatan ini adalah:

1. Direktur Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian, dengan topik bahasan: "Kebijakan Hilirisasi Industri Persusuan Nasional"
2. Direktur Budidaya Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan topik bahasan: "Kebijakan dan Program Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa"
3. Direktur PT. GGLC Lampung, dengan topik bahasan: "Peluang dan Kendala Pengembangan Sapi Perah di Luar Pulau Jawa"
4. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan topik bahasan: "Jejaring Pengembangan Sapi Perah di Asia".

Pertemuan ini dihadiri oleh 150 peserta dari lingkup Asisten Kedeputian Bidang Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Litbang Pertanian), BAPPENAS, Perguruan Tinggi (UNNAN, IPB, UGM, UNDIP, UNSRI), LIPI, Dinas Peternakan (Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan), PB-ISPI,

PB-PDHI, GKSI Pusat dan Daerah, Peternak Sapi Perah Mandiri, Perusahaan Swasta dibidang Persusuan, BPTU Sapi Lokal dan Unggas Sembawa, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah dan HPT Batu Raden Jawa Tengah.

Workshop dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Selatan yang diawali oleh Arahan dan Sambutan dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Perekonomian dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Diskusi dilakukan secara panel setelah para narasumber menyampaikan paparan dengan dialog interaktif antara penanya dengan narasumber, yang dilanjutkan dengan perumusan dari hasil-hasil pemaparan dan diskusi. Rumusan hasil workshop telah disampaikan kepada seluruh peserta, sedangkan buku ini diterbitkan sebagai salah satu output dari kegiatan sekaligus juga sebagai dokumen bahan rujukan opsi/alternatif rekomendasi kebijakan untuk pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa.

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran dari pertemuan ini adalah para pelaku usaha sapi perah dan pemegang kebijakan di bidang usaha sapi perah (baik yang ada di Pusat maupun Daerah) agar kebijakan pengembangan sapi perah di luar pulau Jawa dapat dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha tidak ragu membuka usaha ini. Dengan demikian pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa dapat tercapai sesuai rencana.

TUJUAN

Workshop ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif/opsi kebijakan terkait dengan pengembangan usaha ternak perah di luar Pulau Jawa secara massive sehingga dapat meningkatkan populasi ternak perah nasional dan konsumsi susu segar secara signifikan.

IMPLEMENTASI CETAK BIRU PERSUSUAN INDONESIA 2013-2025

Perkiraan konsumsi susu masyarakat Indonesia pada tahun 2015 mencapai 11,64 liter/kapita/tahun dengan kebutuhan mencapai 2,93 juta liter. Konsumsi susu ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang telah mencapai 20 liter/kapita/tahun. Pemenuhan kebutuhan susu dari dalam negeri baru sebesar 21% sedangkan selebihnya dipenuhi dari impor. Permintaan susu lebih dominan di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang besar dan sebagai bahan baku industri pengolah susu (IPS) yang semuanya berada di Pulau Jawa.

Pembangunan IPS di Pulau Jawa dimaksudkan untuk mendekatkan produsen ke konsumen. Hal ini terlihat dari perkembangan investasi di bidang industri pengolahan susu sampai dengan tahun 2014, dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan perluasan investasi. Hal ini meliputi: (i) PT. Indolakto (Pasuruan) dengan kebutuhan susu 200 ton/hari dan nilai investasi Rp 882 Milyar; (ii) PT. Nestle Indonesia (Karawang) dengan kebutuhan susu 100 ton/hari dan nilai investasi Rp 1,3 Triliun; (iii) PT. Garuda Food Putra Putri Jaya (Bandung) dengan kebutuhan susu 50 ton/hari dan investasi Rp 50 Milyar; serta (iv) Fonterra Brands Manufacturing Indonesia yang telah melakukan ground breaking untuk investasi susu di Cikarang, Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 357 Milyar. Dengan adanya investasi baru tersebut akan terjadi

peningkatan kebutuhan bahan baku susu sebesar 127.750 ton/tahun (Kemenperin, 2015).

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi telah menerbitkan Cetak Biru (*Blue Print*) Persusuan Indonesia 2013-2025 pada pertengahan tahun 2014. Diharapkan hal ini dapat menjadi acuan seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi, dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta dapat memberikan kepastian industri susu skala UKM dalam mengembangkan usahanya dengan bahan baku lokal secara berkelanjutan. Namun demikian tampaknya buku ini masih belum dijadikan rujukan oleh berbagai pihak terkait termasuk dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Produksi susu di dalam negeri pada tahun 2014 mencapai 798.380 ton yang berasal dari 483.013 ekor sapi perah. Sebaran sapi perah sebagian besar masih dominan di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari produksi susu sebesar 99,31% dihasilkan di Pulau Jawa, sedangkan sisanya di Sumatera 0,34%, Sulawesi 0,23%, Kalimantan 0,10% dan Kepulauan Bali, NTT, NTB sebesar 0,02%. Pengembangan sapi perah yang masih dominan di Pulau Jawa ini tidak diimbangi oleh daya dukung lahan pakan hijauan yang cukup sehingga peternak memberikan persentase konsentrat lebih tinggi dibandingkan pakan hijauan (70%:30%) yang menyebabkan kualitas susu cenderung rendah.

Permintaan susu di luar Pulau Jawa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran akan pentingnya susu bagi kesehatan dan kecerdasan anak. Selain itu beberapa daerah di luar Pulau Jawa mempunyai budaya mengkonsumsi makanan berbahan dasar susu antara lain: dangke di Sulawesi Selatan, dadih di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sehingga permintaan susu akan selalu ada. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang mempunyai potensi untuk pengembangan sapi perah yaitu: Provinsi Aceh (Aceh Besar, Bener Meriah, Gayo Luwes); Provinsi Sumatera Utara (Binjai, Karo, Deliserdang, Langkat, Tobasa, Samusir); Provinsi Sumatera Barat (Kota Sawahlunto, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, 50 kota); Provinsi Riau (Kota Dumai, Pelalawan, Kampar); Provinsi Sumatera Selatan (Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan); Provinsi Bengkulu (Kepahiang, Rejang Lebong); Provinsi Jambi (Kerinci); Provinsi Lampung (Metro, Tanggamus, Lampung Barat); Provinsi Kalimantan Selatan (Banjar Baru, Kota Baru); Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak); Provinsi Sulawesi Selatan (Sinjai, Enrekang, Pinrang, Gowa); Provinsi Sulawesi Utara (Tomohon, Minahasa); dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Muna).

Pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa perlu dilakukan secara *integrated system* untuk menekan biaya produksi. Integrasi yang dimaksud yaitu selain memelihara ternak sapi yang menghasilkan susu juga memelihara pejantan sapi perah sebagai penghasil daging. Hal ini juga dapat melengkapi permintaan

daging sapi yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu pemanfaatan kotoran sebagai pupuk tanaman yang menghasilkan peningkatan produksi tanaman ataupun limbah tanaman/pertanian tersebut digunakan sebagai pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas dapat meningkatkan efisiensi dalam usaha sehingga memberikan pendapatan yang lebih bagi peternak.

1. Pemerintah mendorong pengembangan ternak perah di luar Pulau Jawa melalui pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana), peningkatan investasi dan industri serta fasilitasi permodalan. Selain itu perlu peningkatan SDM peternak selaku aktor dalam budidaya ternak perah untuk meningkatkan produksi susu. Khusus investasi, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi IPS terbuka 100% untuk asing tetapi harus dalam bentuk kemitraan (bahan baku, peralatan, keahlian). Untuk mendorong investasi persusuan di luar Pulau Jawa telah diterbit Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu atau Daerah Tertentu, dengan lokasi di provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, NTB dan Bali. Fasilitas pajak dimaksud berupa *tax allowance* bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman

modal. dalam pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri juga harus ditingkatkan kapasitasnya.

2. Secara nasional untuk meningkatkan produksi dan konsumsi susu nasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan bahan baku susu dengan meningkatkan produksi sapi *Frisen Holstein* (FH) dan melakukan diversifikasi bangsa sapi perah selain FH.
 - b. Peningkatan produksi melalui peningkatan populasi. Diharapkan IPS yang akan membangun investasi pabrik pengolahan susu melakukan investasi untuk memenuhi 30% kebutuhan bahan baku di dalam negeri.
 - c. Peningkatan usaha rearing sapi perah dengan bahan baku pedet baik dari dalam negeri maupun impor.
 - d. Peningkatan produktivitas ternak perah dengan perbaikan genetik, pakan, pemeliharaan, dan penanganan kesehatan ternak.
 - e. Insentif jaminan pasar melalui peningkatan konsumsi susu dalam Program Susu untuk Anak Usia Pra Sekolah dan Sekolah Dasar yang didorong oleh Pemerintah dan IPS melalui CSR.
 - f. Peningkatan kapasitas SDM dalam teknologi pengolahan susu dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing peternak dan kemudahan akses pembiayaan dan pasar.

Agar buku cetak biru ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuensi, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali dengan situasi persusuan nasional terkini. Keadaan ini dapat diinisiasi oleh kedeputian pangan dan sumberdaya hayati Kemenko Perekonomian bersama Ditjen PKH dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait. Hal ini harus dilakukan segera agar cetak biru persusuan nasional ini dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak (terutama pemangku kepentingan) dalam upaya meningkatkan pembangunan sapi perah di Indonesia termasuk pengembangannya di luar Pulau Jawa.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA

Di luar pulau Jawa, jumlah populasi sapi perah yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi Selatan (36%), diikuti oleh Sumatera Utara (17,5%) dan Sumatera Barat (11%). Populasi sapi perah di Sulawesi Selatan terkonsentrasi di wilayah-wilayah Enrekang, Sinjai dan Sidrap, sedangkan di Sumatera Utara meliputi Medan, Deli Serdang, Langkat, Karo dan Simalungun. Untuk Sumatera Barat sapi perah berada di Padangpanjang dan Pariaman. Kontribusi produksi susu dari luar Jawa masih sangat kecil, yaitu Sumatera 0,34%, Sulawesi 0,23%, Kalimantan 0,10% dan Kepulauan Bali, NTT, NTB sebesar 0,02%.

Kecenderungan pengembangan sapi perah sudah mulai mengarah di luar Pulau Jawa mengingat mulai tumbuhnya sentra-sentra produksi sapi perah secara sporadis. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi daya dukung ruang produksi yang sangat mendukung karena selain masih tersedianya lahan yang luas juga potensi sumber daya pakan yang sangat besar. Sumber daya ini belum dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber pakan, terutama untuk penyediaan hijauan pakan dan bahan konsentrat yang berasal dari hasil samping industri perkebunan dan tanaman pangan. Persoalan mendasar yang menjadi kendala pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa adalah infrastruktur fisik (sarana dan parsarana) serta kelembagaan yang belum memadai karena kultur sumber daya manusia yang

belum berpengalaman dalam manajemen budidaya ternak sapi perah.

Berdasarkan potensi pasar, sumberdaya pakan dan lahan yang tersedia, maka peluang pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa sangat besar untuk mendukung peningkatan populasi dan produksi susu nasional. Oleh karena itu perlu ada program terobosan dalam mengembangkan sapi perah di luar Jawa secara sungguh-sungguh. Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam usaha ini sangat penting untuk diwujudkan segera.

Pengembangan bahan baku industri konvensional untuk susu (sapi perah) merupakan salah satu tugas utama pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Beberapa rencana aksi yang telah diprogramkan, diantaranya adalah: (a) Peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah, (b) Peningkatan produksi dan kualitas susu segar, (c) Peningkatan konsumsi susu segar, (d) Peningkatan pasar dan pemasaran susu serta produk susu, dan (e) Peningkatan industri pengolah susu.

Peluang pengembangan usaha sapi perah di luar Pulau Jawa dapat diarahkan pada usaha agribisnis dengan mempertimbangkan karakteristik usaha meliputi: (a) Sifat peternakan sapi perah yang padat karya, (b) Nilai rasio konsumsi dan impor saat ini sekitar 1:2, (c) Potensi sumber daya pakan yang sangat besar, dan (d) Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Tantangan pengembangan ini juga cukup besar,

diantaranya adalah: (a) Akses permodalan yang terbatas, (b) Produktivitas yang masih rendah, (c) Skala usaha belum ekonomis, (d) Masih tingginya pengolahan susu dengan skala rumah tangga, (e) Kebiasaan mengkonsumsi susu segar masyarakat di luar Pulau Jawa masih sangat rendah, (f) Pemasaran susu segar yang belum efektif, dan (g) Teknologi pengolahan susu relatif rendah.

Pengembangan agribisnis sapi perah terkendala oleh faktor teknis manajemen yang lebih sulit dibandingkan dengan usaha sapi potong dan ketersediaan sumber bibit yang relatif sedikit sekitar 300 ekor per tahun. Guna suksesnya pengembangan sapi perah nasional, peningkatan populasi memiliki peranan yang sangat penting.

Produk susu segar sangat mudah rusak, sehingga semua mata rantai usaha sapi perah harus berdekatan. Di Pulau Jawa infrastruktur sudah cukup baik sehingga pasar dekat dengan produsen. Sebaliknya di luar Pulau Jawa, produsen masih jauh dari pasar, SDM berkualitas sulit didapatkan, topografi yang sesuai untuk peternakan sapi perah terbatas, bibit berkualitas sulit untuk didapatkan, infrastruktur belum memadai dan sosial budaya masyarakat yang belum terbiasa memelihara sapi perah dan belum terbiasa minum susu segar.

PROGRAM DAN STRATEGI KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI SUSU

Melalui Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008, industri pengolahan susu (IPS) termasuk dalam salah satu program prioritas untuk dikembangkan. Susu dapat dikembangkan menjadi berbagai macam produk, yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu:

- a) Kelompok hulu: industri pengolahan susu segar
- b) Kelompok industri antara: industri pengolahan susu *skim milk powder, whole milk powder, dan sweetened condensed milk*
- c) Kelompok hilir: industri pengolahan susu untuk *yoghurt, ice cream, keju, dan permen.*

Peningkatan permintaan terhadap produk susu olahan setiap tahun meningkat sekitar 15%. Beberapa permasalahan dalam hilirisasi industri persusuan adalah:

- a) Masih tingginya impor bahan baku susu dalam bentuk *whole milk powder*
- b) Adopsi kemampuan teknologi yang relatif rendah
- c) Rendahnya investasi dan akses pembiayaan untuk pembangunan IPS
- d) Belum ada harmonisasi tariff bea masuk bahan baku susu (5%) dan tariff bea masuk produk susu olahan (0%)
- e) IPS masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
- f) Harga susu segar ditingkat peternak masih rendah dan tidak stabil sehingga menghambat upaya peningkatan produksi susu nasional.

Pemerintah berupaya untuk melaksanakan berbagai program pengembangan IPS, meliputi: (a) Peningkatan suplai bahan baku susu melalui program kemitraan yang berkeadilan, (b) Peningkatan kualitas susu olahan menggunakan peralatan modern, (c) Pelatihan SDM di bidang IPS, (d) Pengembangan diversifikasi produk susu, (e) Penerapan standar mutu bahan baku pengolahan susu sesuai SNI, dan (f) Kajian *feasibility study* untuk pengembangan IPS di luar Pulau Jawa, serta (g) Jaminan harga susu yang wajar/layak dan berkeadilan di tingkat peternak. Pemerintah juga telah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui penerapan kebijakan insentif melalui Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal. Insentif diberikan bagi investor di bidang industri pengolahan susu dalam bentuk *tax allowance*, dan diharapkan dapat menumbuhkan investasi.

Saat ini, impor bahan baku susu untuk kebutuhan industri masih tinggi karena masih kurangnya kemampuan teknologi di bidang industri pengolahan susu dan permodalan. Bea Masuk bahan baku susu sebesar 5% belum harmonis dibanding Bea Masuk produk susu olahan sebesar 0%. Permasalahan lainnya adalah masih adanya produk susu olahan impor yang beredar di dalam negeri dan industri pengolahan susu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Visi pengembangan industri pengolahan susu adalah mewujudkan industri pengolahan susu yang

berkelanjutan, berdaya saing, mandiri, dan mensejahterakan masyarakat. Arah pengembangannya adalah dengan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan diversifikasi produk susu olahan, memantapkan program kemitraan dengan peternak, pengembangan SDM, pemerataan ke daerah potensi bahan baku, dan peningkatan kualitas produk susu olahan.

Sasaran pengembangan industri pengolahan susu di antaranya adalah peningkatan pertumbuhan industri susu olahan sebesar 10%/tahun. Sementara, program pengembangannya dilakukan dengan peningkatan pasokan bahan baku susu melalui program kemitraan hingga *feasibility study* pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa. Untuk penciptaan iklim usaha, terdapat kebijakan insentif PP No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal.

DUKUNGAN KEBIJAKAN LINTAS KEMENTERIAN UNTUK MENINGKATKAN KONSUMSI SUSU SEGAR

Permintaan susu lebih banyak di Pulau Jawa karena disamping jumlah penduduk yang besar, sebagian besar susu sebagai bahan baku industri pengolah susu (IPS) diproduksi di Pulau Jawa. Pembangunan IPS di Pulau Jawa ini ditujukan guna mendekatkan produk kepada produsen dan konsumen. Hal ini terlihat dari perkembangan investasi di bidang industri pengolahan susu, dimana sampai dengan tahun tahun 2014 terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan perluasan investasi. Dengan meningkatnya permintaan susu di luar Jawa, hendaknya pemerintah mendorong para investor untuk berinvestasi pengembangan sapi perah di luar Jawa berupa pembangunan IPS. Dengan keberadaan IPS yang awalnya berbahan baku impor akan memacu berkembangnya usaha sapi perah diluar Jawa karena ada IPS yang akan menjamin tersedianya pasar untuk menampung susu segar yang diproduksi peternak sapi perah.

Selain itu Pemerintah harus mewujudkan program pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa melalui pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana), peningkatan investasi dan industri serta fasilitasi permodalan. Juga perlu peningkatan SDM peternak dalam budidaya sapi perah untuk meningkatkan produksi susu, serta promosi dan kampanye minum susu bagi anak usia sekolah. Oleh karenanya,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengembangkan program minum susu bagi anak usia sekolah, terutama anak-anak tingkat SD. Program ini juga harus didukung oleh kementerian Perindustrian yang akan mendukung berkembangnya industri susu olahan skala menengah (UKM).

Dalam hal investasi, berdasarkan Daftar Negatif Investasi yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi IPS terbuka 100% untuk asing dalam bentuk kemitraan (bahan baku, peralatan, keahlian). Untuk mendorong investasi persusuan di luar Pulau Jawa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu atau Daerah Tertentu, dengan lokasi di provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Fasilitas pajak dimaksud berupa *tax allowance* bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal.

Sebagian besar konsumsi susu di dalam negeri, sekitar 70% berasal dari impor. Produk susu yang paling banyak diimpor berasal dari Australia dan Selandia Baru yang mendapatkan keuntungan dari kedekatan letak geografis dan hubungan perdagangan yang sudah cukup lama. Konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia hanya 13 l/tahun yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai 22 l/tahun.

Indonesia memiliki sekitar 500 ribu ekor sapi perah yang sebagian besar diusahakan oleh peternak rakyat dengan skala usaha relatif kecil dan cenderung dimiliki individu petani yang tergabung dalam koperasi susu lokal (KUD). Pembangunan industri sapi perah Indonesia memerlukan kesegeraan, perencanaan strategis dan jangka panjang. Beberapa hal yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, diantaranya adalah regulasi dan kepastian perencanaan daerah terkait dengan lahan, topografi, sumber air, sumber pakan, bibit unggul, infrastruktur dan sosial/keamanan. Kondisi di negara lain (Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, dan lainnya) adalah skala besar, kondisi alam mendukung, bibit unggul, teknologi pengolahan limbah sudah maju, teknologi pengolahan maju, biaya listrik rendah, teknologi pakan maju dan efisien, produk insentif regulasi dan subsidi pemerintah.

Pengembangan sapi perah harus dibarengi dengan dukungan mulai dari penyediaan bibit, produksi, penanganan susu, pemasaran dan kelembagaan lain termasuk permodalan, khususnya pengembangan persusuan di luar Pulau Jawa yang secara umum belum memiliki kelembagaan, sistem, dan akses pemasaran dengan biaya tinggi.

JEJARING PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI ASIA

Susu dan sapi perah diperlukan karena saat ini terdapat miliaran penduduk di dunia yang telah mengkonsumsi susu dan produk susu setiap hari. Susu dapat berperan dalam misi untuk menghapuskan kelaparan dan memperbaiki ketahanan pangan bagi seluruh penduduk di dunia. Susu merupakan sumber energi, berupa makro nutrien, dan mikronutrien penting yang memasok sekitar 3% energi, 7% protein, dan 8% lemak dalam makanan bagi penduduk di Asia dan Afrika.

Kawasan Asia telah menjadi pemain utama di tataran global dalam produksi dan konsumsi susu/produk susu. Dalam dekade terakhir, pertambahan agregat konsumsi susu di Asia telah mencapai dua kali lipat melebihi rata-rata dunia. Pertumbuhan permintaan susu di Asia terjadi justru pada saat isu keterbatasan sumberdaya, berbagai tekanan terhadap sumberdaya pakan, perubahan iklim dan tuntutan kesetaraan pembangunan; Petani dan peternak diseluruh dunia menghadapi tantangan memproduksi pangan lebih banyak, dalam memenuhi permintaan konsumen dan kelestarian lingkungan, sehingga perlu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam.

Menghadapi kondisi ini, sub sektor peternakan khususnya sapi perah, menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha disepanjang rantai nilai susu harus mengadopsi teknologi dan tatalaksana yang

mengintegrasikan berbagai kepentingan seperti kesehatan lingkungan, keuntungan ekonomi dan tuntutan kesetaraan sosial ekonomi masyarakat.

Transisi ke arah produksi susu yang keberlanjutan harus mempertimbangkan kelestarian yang selaras dengan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan, karena solusi bersifat yang parsial tidak akan memberikan hasil. Pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak akan berkelanjutan bila tidak mempertahankan ekosistem. Kompleksitas ini menunjukkan perlunya mengintegrasikan kepentingan berbagai stakeholders dalam meminimumkan dampak negatif dari pertumbuhan permintaan susu dan produk susu untuk mewujudkan kekuatan sistem produksi sapi perah di Asia.

Dalam rangka memperkuat Jejaring Persusuan di Asia, pertemuan regional 'Dairy Asia-Towards Sustainability diprakarsai oleh FAO-RAP, telah dilakukan di Bangkok, Thailand 21-23 Mei 2014, dan di Anand, India 23-26 Maret 2015. Pertemuan dihadiri oleh pejabat pemerintah, lembaga penelitian, LSM, Lembaga Multilateral, fihak swasta, para ahli, serta jejaring regional dan global dari sekitar 20 negara. Pertemuan membahas platform yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan membangun arah dalam berbagai skenario, untuk direspon oleh berbagai negara peserta. Tema diskusi dalam pertemuan ini (i) Sumberdaya alam dan lingkungan, (ii) Kelangkaan pakan, dan (iii)

Ketahanan pangan, perdesaan, kesehatan dan gizi masyarakat.

Manfaat jejaring persusuan Asia adalah: (a) Penguatan dukungan dalam perbaikan nutrisi ternak, program pemuliaan yang tepat, dukungan keswan yang baik, dan daur ulang nutrien yang efisien; (b) Promosi pasar yang efisien dan adil, termasuk struktur kelembagaan untuk mengintegrasikan produsen skala kecil kedalam rantai nilai modern; (c) Membangun lapangan kerja, peluang pendapatan, serta ketahanan pangan rumahtangga dan kehidupan perdesaan; (d) Meningkatkan kualitas dan keamanan produk susu termasuk memperbaiki regulasi; (e) Meningkatkan kesadaran konsumen agar mampu menentukan pilihan; (f) Membantu pengembangan school milk programs di berbagai negara sebagai bagian dari program strategi nutrisi; (g) Memperkuat kapasitas stakeholder dalam memanfaatkan inovasi dalam menghadapi resiko produksi kedepan; (h) Meningkatkan peran dan profil persusuan dalam proses pengambilan kebijakan nasional dan internasional; serta (i) Meminimalkan dampak negatif industri persusuan terhadap sumberdaya alam, lahan, air dan biodiversitas serta mitigasi perubahan iklim.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari hasil pemaparan narasumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut. Hal ini diantaranya adalah:

1. Produksi susu segar dalam negeri masih harus ditingkatkan karena dewasa ini baru mampu memenuhi sekitar 22% dari kebutuhan konsumsi dalam negeri. Keadaan ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha sapi perah melalui peningkatan populasi dan produktivitas, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
2. Sudah saatnya pembangunan sapi perah di luar Pulau Jawa dimulai dengan kesadaran penuh dan *joint initiative* lintas kementerian terkait untuk meningkatkan produksi dan konsumsi susu.
3. Pengembangan usaha sapi perah di luar Pulau Jawa masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia agar dapat memelihara ternak sapi perah dengan benar dan sehat (*good farming practice*). Untuk itu, pendampingan teknologi dan bantuan teknis masih diperlukan.
4. Pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa antara lain dilakukan secara *integrated system* untuk menekan biaya produksi. Integrasi yang dimaksud yaitu selain memelihara ternak sapi yang menghasilkan susu juga memelihara anak sapi perah

jantan sebagai penghasil daging. Hal ini sekaligus mendukung produksi daging nasional. Selain itu pemanfaatan kotoran sebagai sumber biogas dan ampas/ endapan sisa limbah biogas digunakan sebagai pupuk tanaman dapat meningkatkan efisiensi dalam usaha sehingga memberikan pendapatan yang lebih bagi peternak dan lingkungan.

5. Pulau Sumatera sebagai pulau kedua terpadat penduduknya di Indonesia setelah Pulau Jawa, memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha sapi perah. Diperlukan adanya pembangunan pabrik pengolahan susu yang berdekatan dengan lokasi sentra produksi susu. Beberapa kriteria agar pabrik pengolahan susu dapat dibangun di luar Pulau Jawa adalah:
 - a) Manajemen usaha sapi perah harus mengarah pada usaha industri dengan tetap mengutamakan azas ketahanan pangan. Usaha peternakan rakyat harus didorong untuk tetap tumbuh, namun perlu edukasi untuk usaha dengan orientasi efisiensi. Agar usaha peternakan ini secara ekonomi menguntungkan maka usaha peternakan yang didirikan harus dapat terintegrasi dari hulu ke hilir dengan pendekatan agribisnis.
 - b) Perlunya perbaikan tata niaga atau struktur pasar yang baik. Dinas terkait yang mengayomi kelembagaan seperti perizinan usaha harus dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Izin usaha

harus dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Diperlukan adanya regulasi bisnis yang baik, seperti kemitraan usaha yang berkeadilan, dimana peternak sebagai mitra juga memiliki posisi tawar yang tinggi. Dihindari adanya unsur eksplorasi mitra untuk kepentingan pengusaha.

- c) Perlunya instrumen kebijakan harga yang dapat menarik minat peternak untuk berusaha sapi perah. Sebagai contoh, harga produk susu segar harus kompetitif dibandingkan harga susu impor.

6. Peningkataan produksi dan konsumsi susu nasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengembangan program usaha sapi perah harus dibuat secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir yang didukung dengan kemudahan untuk akses terhadap permodalan, ketersediaan bibit unggul, dukungan teknologi modern dan dukungan SDM yang mumpuni serta diselenggarakan di topografi yang sesuai dan dengan infrastruktur yang memadai.
- b) Mendorong IPS yang akan membangun investasi pabrik pengolahan susu melakukan investasi untuk memenuhi 30% kebutuhan bahan baku di dalam negeri.
- c) Insentif jaminan pasar melalui peningkatan konsumsi susu dalam Program Susu untuk Anak Usia Pra Sekolah dan Sekolah Dasar (PMTAS)

yang difasilitasi oleh pemerintah dan IPS melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya.

- d) Promosi untuk meningkatkan konsumsi SSDN oleh masyarakat harus dilakukan bersamaan (simultan) dengan upaya pemecahan masalah yang lain. Kampanye minum susu berbasis SSDN perlu terus didorong sehingga dapat menciptakan pasar tersendiri. Melalui perkembangan pemasaran yang berkesinambungan, diyakini ekspansi industri pengolahan susu skala UKM dapat berkembang dengan konsep model kemitraan yang selama ini berlangsung.
- e) Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan dukungan untuk pengembangan persusuan melalui fasilitasi teknologi, dana dan membuka peluang pasar melalui gerakan minum susu bagi anak-anak sekolah dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa sesuai dengan UUD 1945.
- f) Diversifikasi produk olahan susu perlu dilakukan untuk memberikan variasi pilihan produk susu bagi konsumen. Produsen produk susu dan olahannya yang berskala UKM dapat melakukan produksi tanpa harus memiliki segala fasilitas produksi dan pengolahan sendiri.
- g) Perlu adanya harmonisasi *tariff* bea masuk bahan baku susu yang saat ini mencapai 5%, dibandingkan dengan *tariff* bea masuk produk susu olahan yang hanya 0%.

h) Cetak biru persusuan Indonesia 2025 perlu segera disosialisasikan meskipun masih perlu ditinjau ulang di kemudian hari agar pelaku usaha dan pihak produsen serta konsumen susu dan pihak lain yang terkait dapat segera memulai langkah dan partisipasinya dalam pengembangan persusuan di Indonesia.

MATRIKS RENCANA TINDAK STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA			
Melakukan penyempurnaan Blue Print Persusuan Nasional 2014-2025 dari Kemenko Perekonomian	Blue Print Persusuan Nasional 2015-2025 yang disempurnakan	2015- 2016	Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Ditjen PKH, BAPPENAS, GKSI
Menerbitkan Permentan tentang Kebijakan Pengembangan Sapi Perah di luar Jawa	Permentan tentang Kebijakan Pengembangan Sapi Perah di luar Jawa	2015-2016	Ditjen PKH, BAPPENAS, GKSI
Menerbitkan Peraturan Dirjen PKH tentang pengembangan sapi perah diluar Jawa	Perdirjen PKH tentang Pengembangan sapi perah diluar Jawa	2015-2016	Ditjen PKH
II. STRATEGI PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR JAWA			
Menerbitkan MoU Lintas Kementerian tentang Pengembangan sapi perah diluar Jawa	MoU Lintas Kementerian tentang Pengembangan sapi perah diluar Jawa	2015-2016	Kedeputian Pangan Kemenko Perekonomian, Ditjen PKH, Bappenas
Fasilitasi kebijakan penanaman modal pengembangan IPS di luar Jawa (pemberian insentif kemudahan/fasilitasi)	Peraturan Kebijakan insentif Pengembangan IPS di luar Jawa	2015-2016	Ditjen PKH, BKPM, Kemenperin, Kemendag

Pemberian Insentif Harga Susu segar ditingkat peternak	Jaminan harga susu ditingkat peternak menguntungkan	2015-2016	Kemendag, Ditjen PKH, Kemenperin
Pembangunan infrastruktur sarana prasarana	Kelancaran distribusi dan pengolahan susu segar ke IPS maupun IPS skala kecil	2016-2017	Kemtan, Pemda, Kemenkop dan UKM
Pengembangan usaha sapi perah skala UKM	Berkembangan usaha sapi perah skala UKM	2016- 2018	Kemenkop dan UKM
Edukasi dan promosi kepada konsumen terhadap produk susu sehat	Kesadaran untuk mengkonsumsi susu segar meningkat, program minum susu bagi anak sekolah	2015-2018	Kemenkes, Ditjen PKH, Kemdikbud, YLKI, Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi
Pemberian kemudahan perizinan usaha sapi perah dan olahannya	Kelancaran/ Percepatan izin usaha sapi perah di luar Jawa	2015-2016	Pemda, Kemendag, Kemenperin

III. KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN

Perlunya subsidi bunga bank dari pemerintah	Skema kredit dengan bunga bank yang terjangkau	2015-2017	Perbankan, Kemenkeu
Pembentukan kelembagaan pemasaran	Jaminan pasar bagi pelaku usaha sapi perah	2015-2017	Ditjen PKH Kemendag
Pembangunan infrastruktur yang memadai	Jaminan adanya fasilitas pengangkutan susu segar sampai koperasi dan atau IPS	2016-2017	Kemen PU, Pemda
Peningkatan strategi dan kebijakan industri persusuan di luar jawa	Strategi dan kebijakan industri persusuan di luar Jawa	2015-2016	Kementan, Kemendag, Kemenkop dan UKM

DAFTAR BACAAN

Direktur Budidaya Ternak. 2015. "Kebijakan dan Program Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa". Makalah dipresentasikan pada Workshop "Kebijakan Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Konsumsi Susu Segar".

Bahri, S., TD. Soedjana, B. Haryanto, Subandryo, A. Priyanti, dan B. Tiesnawati. 2013. Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susus Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015. Puslitbang Peternakan Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.

Direktur Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian. 2015. "Kebijakan Hilirisasi Industri Persusuan Nasional". Makalah dipresentasikan pada Workshop "Kebijakan Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Konsumsi Susu Segar".

Direktur PT. GGLC. 2015. "Peluang dan Kendala Pengembangan Sapi Perah di Luar Pulau Jawa". Makalah dipresentasikan pada Workshop "Kebijakan Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Konsumsi Susu Segar".

GKSI. 2013. Membangun kemitraan peternak sapi perah dengan industri pengolahan susu. Makalah disampaikan dalam *Roundtable Discussion: Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN*

2015. Bogor, 2 Mei 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

Kemenko Bidang Perekonomian. 2013. Arah dan strategi kebijakan persusuan Indonesia 2025. Makalah disampaikan dalam *Roundtable Discussion: Pengembangan Struktur Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015*. Bogor, 2 Mei 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

Kementerian Koordinator Perekonomian. 2014. Cetak Biru Persusuan Nasional 2014-2025.

Soedjana, T.D. 2014. Partisipasi konsumsi sebagai alat ukur status ketahanan pangan daging. *Wartazoa* Vol 23 (4): 166-175.

Soedjana, TD. 2015. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan topik bahasan: "Jejaring Pengembangan Sapi Perah di Asia". Makalah dipresentasikan pada Workshop "Kebijakan Pengembangan Ternak Perah di Luar Pulau Jawa Guna Meningkatkan Produksi Daging dan Konsumsi Susu Segar".

TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN VETERINER

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor: 33/OT.050/I.5/01/2015 Tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, maka Tim dimaksud adalah:

1. Prof (R) Dr. Sjamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
5. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
6. Dr. drh. Suhardono, Balai Besar Penelitian Veteriner
7. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
8. Dr. Eko Handiwirawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
9. Dr. Wisri Puastuti, Balai Penelitian Ternak
10. Priyono, S.Pt, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

11. Mohammad Ikhsan Shiddieqy, S.Pt, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

TIM PERUMUS

1. Prof (R) Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

LAMPIRAN

IMPLEMENTASI BLUE PRINT PERSUSUAN NASIONAL

Bambang A. Winarso

Deputi Bid. Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

RINGKASAN

Permintaan susu diluar Pulau Jawa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran akan pentingnya susu bagi kesehatan dan kecerdasan anak. Selain itu beberapa daerah di Luar Pulau Jawa mempunyai budaya mengkonsumsi makanan berbahan dasar susu antara lain: dangke di Sulawesi Selatan, dadih di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sehingga permintaan susu akan selalu ada.

Beberapa daerah di Luar Pulau Jawa yang mempunyai potensi untuk pengembangan sapi perah yaitu: Provinsi Aceh (Aceh Besar, Bener Meriah, Gayo Luwes); Provinsi Sumut (Binjai, Karo, Deliserdang, Langkat, Tobasa, Samosir); Provinsi Sumbar (Kota Sawahlunto, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, 50 kota); Provinsi Riau (Kota Dumai, Pelalawan, Kampar); Provinsi Sumsel (Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan); Provinsi Bengkulu (Kepahiang, Rejang Lebong); Provinsi Jambi (Kerinci); Provinsi Lampung (Metro, Tanggamus, Lampung Barat); Provinsi Kalsel (Banjar Baru, Kota Baru); Provinsi Kalbar (Pontianak); Provinsi Sulsel (Sinjai, Enrekang, Pinrang, Gowa); Provinsi Sulut (Tomohon, Minahasa); dan Provinsi Sultra (Muna).

Pemerintah mendorong pengembangan ternak perah di luar Pulau Jawa melalui pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana), peningkatan investasi dan industri serta fasilitasi permodalan. Selain itu perlu peningkatan SDM peternak selaku aktor dalam budidaya ternak perah untuk meningkatkan produksi susu. Khusus investasi, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, investasi IPS terbuka 100% untuk asing tetapi harus dalam bentuk kemitraan (bahan baku, peralatan, keahlian). Untuk mendorong investasi persusuan di luar Pulau Jawa telah diterbit Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Terentu atau Daerah Tertentu, dengan lokasi di provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, NTB dan Bali. Fasilitas pajak dimaksud berupa *tax allowance* bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal. dalam pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri juga harus ditingkatkan kapasitasnya.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR PULAU JAWA

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

RINGKASAN

Peluang dan pengembangan agribisnis sapi perah di luar Pulau Jawa di antaranya kondisi Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan sangat kaya dengan sumber pakan ternak ruminansia, di samping lahan yang masih cukup luas juga terdapat daerah yang sesuai untuk pengembangan sapi perah. Selain itu, laju pertumbuhan penduduknya pesat (rata-rata 1,49%/tahun), terutama anak-anak usia sekolah, sebagai konsumen utama produk susu. Di beberapa sentra baru sapi perah luar Pulau Jawa, budaya mengkonsumsi makanan berbahan dasar susu (danke di Sulsel, dadih di Sumut dan Sumbar), cukup berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, harga susu ditentukan oleh peternak yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen, sehingga relatif lebih tinggi dari harga susu di Pulau Jawa.

Solusi terhadap berbagai tantangan adalah perlunya pionir yang kreatif, dukungan pemerintah daerah, dan koordinasi lintas sektor. Kendala yang ada saat ini adalah belum ada industri pengolahan susu di luar Jawa, kecuali dalam skala kecil. Sebagian sentra baru di luar Jawa masih tergantung penyediaan pakan dari Pulau Jawa. Selain itu, bibit sapi perah masih kurang, produksi susu belum populer, dan kurangnya dana khusus untuk peternak. Oleh karenanya diperlukan peningkatan kapasitas peternak, produktivitas ternak, pengembangan infrastruktur, komunikasi kepada masyarakat, dan koordinasi pemangku kepentingan.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa adalah model pengembangan, pendirian koperasi, unit pengolahan susu, pemasaran, pakan, penerapan Sistem Informasi Sapi Perah Indonesia (SISI), penanggulangan penyakit, dan pembibitan dan *rearing unit*.

KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI PERSUSUAN NASIONAL

Djodi Hidayat

Direktorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya,
 Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian

RINGKASAN

Penyediaan pangan yang bergizi untuk mencerdaskan sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi merupakan peran strategis dari usaha persusuan nasional. Kebutuhan bahan baku untuk susu olahan dalam negeri sekitar 3,8 juta ton dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri sebanyak 914.000 (24%) dan sisanya sebesar 2,89 juta ton masih harus diimpor dari berbagai negara. Konsumsi susu penduduk Indonesia sekitar 12,01 kilogram/kapita/tahun setara susu segar. Jumlah ini masih jauh di bawah negara ASEAN, yaitu Filipina sebanyak 17,8 kilogram/kapita/tahun, Malaysia sebanyak 36,2 kilogram/kapita/tahun, Thailand sebanyak 22,2 kilogram/kapita/tahun, dan Singapura sebanyak 32 kilogram/kapita/tahun.

Sesuai Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional antara diterangkan bahwa Pengolahan Susu termasuk prioritas untuk dikembangkan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 122/M-IND/PER/10/2009 telah ditetapkan "Peta Panduan Pengembangan Klaster Pengelohan Susu". Industri pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu cair, susu bubuk, susu kental

manis, keju, mentega, yoghuer dan es krim dan produk olahannya. Industri pengolahan susu pada umumnya menggunakan susu segar sebagai bahan baku. Bahan tambahan lainnya gula, krim, dan minyak nabati.

Tantangan dan permasalahan utama dalam industri pengolahan susu adalah sebagian besar bahan baku industri susu olahan (76%) impor dalam bentuk *skim powder milk*, *butter milk powder*, dan lainnya, namun demikian dapat dijadikan peluang bagi peternak sapi perah untuk meningkatkan produksi susu sapi dalam negeri. Tantangan lainnya adalah dengan akan diberlakukannya AEC dan RCEP, makan akan semakin terbuka peluang ekspor susu olahan. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa konsumsi susu penduduk Indonesia yang masih di bawah negara ASEAN dan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk susu olahan.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI LUAR PULAU JAWA

Dayu Ariasintawati

Direktur PT. Great Giant Livestok

RINGKASAN

Dari mayoritas susu yang dikonsumsi di dalam negeri, sekitar 70% berasal dari impor. Produk susu yang paling banyak diimpor berasal dari Australia dan Selandia Baru yang mendapatkan keuntungan dari kedekatan geografis dan hubungan perdagangan lama, konsumsi susu per kapita Indonesia hanya 13 liter per tahun yang secara signifikan lebih rendah dari 22 liter di Filipina. Indonesia memiliki sekitar 500 ribu ekor sapi perah yang sebagian besar ditemukan dalam jumlah kecil dan cenderung dimiliki individu petani yang tergabung dalam koperasi susu lokal (KUD).

Pembangunan industri sapi perah Indonesia memerlukan kesegeraan, perencanaan strategis dan jangka panjang. Beberapa hal yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, regulasi dan kepastian perencanaan daerah terkait dengan lahan, topografi, sumber air, sumber pakan, bibit unggul, infrastruktur dan sosial/keamanan. Kondisi di negara lain (Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, dan lainnya) adalah skala besar, kondisi alam mendukung, bibit unggul, teknologi pengolahan limbah sudah maju, teknologi pengolahan maju, biaya listrik rendah, teknologi pakan maju dan efisien, produk insentif regulasi dan subsidi pemerintah.

Pengembangan sapi perah harus dibarengi dengan dukungan mulai dari penyediaan bibit, produksi, penanganan susu, pemasaran dan kelembagaan lain termasuk permodalan, khususnya pengembangan persusuan di luar Jawa yang secara umum belum memiliki kelembagaan, sistem, dan akses pemasaran dengan biaya tinggi.

JEJARING PENGEMBANGAN SAPI PERAH DI ASIA

Tjeppy D Soedjana

Profesor Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

RINGKASAN

Dalam rangka memperkuat Jejaring Persusuan di Asia, pertemuan regional 'Dairy Asia-Towards Sustainability diprakarsai oleh FAO-RAP, telah dilakukan di Bangkok, Thailand 21-23 Mei 2014, dan di Anand, India 23-26 Maret 2015. Pertemuan dihadiri oleh pejabat pemerintah, lembaga penelitian, LSM, Lembaga Multilateral, fihak swasta, para ahli, serta jejaring regional dan global dari sekitar 20 negara. Pertemuan membahas platform yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan membangun arah dalam berbagai skenario, untuk direspon oleh berbagai negara peserta. Tema diskusi dalam pertemuan ini (i) Sumberdaya alam dan lingkungan, (ii) Kelangkaan pakan, dan (iii) Ketahanan pangan, perdesaan, kesehatan dan gizi masyarakat.

Manfaat jejaring persusuan Asia adalah (1) Penguatan dukungan dalam perbaikan nutrisi ternak, program pemuliaan yang tepat, dukungan keswan yang baik, dan daur ulang nutrien yang efisien; (2) Promosi pasar yang efisien dan adil, termasuk struktur kelembagaan untuk mengintegrasikan produsen skala kecil kedalam rantai nilai modern; (3) Membangun lapangan kerja, peluang pendapatan, serta ketahanan pangan rumahtangga dan kehidupan perdesaan; (4)

Meningkatkan kualitas dan keamanan produk susu termasuk memperbaiki regulasi; (5) Meningkatkan kesadaran konsumen agar mampu menentukan pilihan; (6) Membantu pengembangan school milk programs di berbagai negara sebagai bagian dari program strategi nutrisi; (7) Memperkuat kapasitas stakeholder dalam memanfaatkan inovasi dalam menghadapi resiko produksi kedepan; (8) Meningkatkan peran dan profil persusuan dalam proses pengambilan kebijakan nasional dan internasional; (9) Meminimalkan dampak negatif industri persusuan terhadap sumberdaya alam, lahan, air dan biodiversitas serta mitigasi perubahan iklim.

ISBN : 978-602-8475-92-1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail : crlansci@indo.net.id